

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA RANTAU KEMINTING KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Indah Perdana Sari¹, Munawarah², Siti Paulina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: indahperdanasari87@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rantau Keminting. Permasalahan utama yang ditemukan adalah kurangnya sumber daya manusia yang bersedia terlibat dalam pengelolaan BUMDes, minimnya sosialisasi dari pelaksana BUMDes kepada masyarakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Meskipun ada sejumlah individu yang berpartisipasi, jumlah sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan ini masih sangat terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Rantau Keminting dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan mengambil sampel secara purposive sampling yang terdiri dari 12 orang. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di Desa Rantau Keminting masih belum optimal. Dalam aspek perencanaan, indikator rencana kegiatan dinilai baik, karena sudah dirancang sejak tahun-tahun sebelumnya. Indikator strategi juga menunjukkan hasil yang positif, di mana perencanaan telah mempertimbangkan strategi masa depan. Namun, dalam aspek pengorganisasian, meskipun pembagian tugas sudah dilakukan dengan baik, indikator pelimpahan wewenang masih perlu diperbaiki agar dapat berfungsi lebih optimal. Aspek staffing menunjukkan bahwa penempatan sumber daya belum sepenuhnya efektif karena minimnya pelatihan. Dalam hal motivasi, indikator pemberian arahan masih lemah, karena komunikasi langsung kepada anggota belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam aktivitas BUMDes juga tergolong rendah, dengan hanya pengelola dan pemerintah desa yang aktif bergerak. Aspek pengendalian menunjukkan bahwa penilaian pelaksanaan pengelolaan BUMDes belum memuaskan; pemasaran yang terbatas dan keuntungan yang belum signifikan menjadi hambatan. Tindakan perbaikan yang diterapkan juga belum efektif, lebih banyak berupa teguran daripada tindakan nyata dan sanksi. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes meliputi kurangnya sumber daya manusia dan strategi pemasaran yang tidak memadai. Di sisi lain, faktor pendorong yang ada adalah potensi peningkatan ekonomi desa yang bisa diperoleh melalui pengelolaan BUMDes yang lebih baik.

Kata Kunci : Pengelolaan, BUMDes

ABSTRACT

In this study, the author identified several problems faced in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Rantau Keminting Village. The main problems found were the lack of human resources willing to be involved in the management of BUMDes, minimal socialization from BUMDes implementers to the community, and low community participation. Although there were a number of individuals who participated, the number of human resources who were experts in this management was still very limited. The purpose of this study was to understand how BUMDes was managed in Rantau Keminting Village and the factors that influenced its management. This study was conducted with a qualitative approach and used a descriptive type. Data were collected through observation, interviews, and documentation, by taking a purposive sampling sample consisting of 12 people. Data analysis was carried out through reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the management of BUMDes in Rantau Keminting Village was still not optimal. In terms of planning, the activity plan indicator was considered good, because it had been designed since previous years. The strategy indicator also showed positive results, where planning had considered future strategies. However, in terms

of organization, although the division of tasks has been carried out well, the authority delegation indicator still needs to be improved in order to function more optimally. The staffing aspect shows that the placement of resources is not yet fully effective due to the lack of training. In terms of motivation, the indicator of providing direction is still weak, because direct communication to members has not been carried out optimally. In addition, community participation in BUMDes activities is also relatively low, with only managers and village governments actively moving. The control aspect shows that the assessment of the implementation of BUMDes management is not yet satisfactory; limited marketing and insignificant profits are obstacles. The corrective actions implemented are also not yet effective, more in the form of reprimands than real actions and sanctions. Factors that inhibit BUMDes management include a lack of human resources and inadequate marketing strategies. On the other hand, the driving factor is the potential for increasing the village economy that can be obtained through better BUMDes management.

Keywords: Management, BUMDes

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV menyatakan bahwa tujuan dari Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi pada ketertiban dunia. Pembangunan nasional sendiri merupakan usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta berfungsi sebagai proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara demi mewujudkan Tujuan Nasional.

Dengan kata lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai serangkaian upaya berkelanjutan yang menyentuh semua dimensi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka menunaikan tugas untuk mencapai Tujuan Nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional mencerminkan keinginan untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil, merata, dan berkelanjutan, serta mengembangkan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan di kawasan perdesaan juga sangat penting. Pembangunan ini diarahkan untuk menciptakan kegiatan pengembangan yang terpadu dan menyeluruh dengan memberdayakan setiap komponen masyarakat agar dapat meningkatkan potensi masing-masing desa. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di desa, pembangunan perdesaan menjadi aspek krusial dalam pembangunan nasional. Untuk mempercepat pembangunan perdesaan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan di desa.

Dalam konteks ini, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 1, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asali, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan dukungan keuangan untuk desa melalui pemberian dana untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini diharapkan menjadi salah satu strategi untuk memajukan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Banyak BUMDes di berbagai desa telah berhasil beroperasi, memberikan keuntungan, serta meningkatkan pendapatan desa. BUMDes pada dasarnya merupakan institusi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di level desa. Sebagai bagian dari

pemberdayaan ekonomi masyarakat, keberadaan BUMDes diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, yang menekankan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendirian BUMDes adalah langkah inovatif yang patut dihargai, karena dapat mendorong pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa yang sering kali terabaikan.

Menyusun rencana yang efektif seharusnya didasarkan pada data dan informasi yang cukup agar dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi yang ada. Namun, tantangan yang dihadapi terletak pada penentuan jenis data yang dibutuhkan, sumber informasi, serta kedalaman data yang diperlukan, dan cara pengumpulannya. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan BUMDes, penting adanya manajemen yang baik guna mempermudah pencapaian tujuan, baik untuk organisasi maupun individu yang terlibat di dalamnya.

Setiap organisasi yang melibatkan kolaborasi antar individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan manajemen. Manajemen menjadi krusial agar proses pencapaian tersebut lebih efisien. Di Desa Rantau Keminting, misalnya, jumlah penduduk mencapai 1.859 orang, dengan 1.092 di antaranya berada dalam usia produktif. Namun, meskipun banyak warga yang berpotensi, masih terdapat keengganan untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberhasilan dari suatu program atau kegiatan sangat bergantung pada manajemen yang diterapkan. Sebuah pekerjaan akan berhasil bila dikelola secara baik dan teratur, di mana manajemen merupakan rangkaian langkah yang dimulai dari perencanaan hingga pencapaian tujuan akhir. Dengan demikian, peranan manajemen dalam pelaksanaan BUMDes sangatlah penting.

Di Desa Rantau Keminting, terdapat tiga BUMDes yang telah menerima bantuan dana. BUMDes tersebut menyediakan layanan sewa gedung serbaguna dengan tarif antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000, tergantung pada jenis acara; sewa tenda dengan biaya Rp 50.000; sewa kursi seharga Rp 2.000 per item; serta satu unit kolam ikan. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, penemuan terkait BUMDes di Desa Rantau Keminting menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan.

1. Pelaksanaan BUMDes di Desa Rantau Keminting belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesuai rencana. Saat ini, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, termasuk kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersedia mengelola BUMDes. Hingga saat ini, jumlah pengurus BUMDes hanya enam orang, sehingga jelas bahwa SDM yang terlibat masih sangat terbatas. Ketersediaan SDM yang memadai adalah faktor krusial dalam pengembangan usaha BUMDes, karena mereka menjadi salah satu elemen penting dalam proses pertumbuhan usaha tersebut. Dengan jumlah SDM yang kurang, pencapaian tujuan BUMDes menjadi tantangan, yang dapat menghambat dan memperlambat perkembangan di masa depan. (Sumber Data: Aparatur Desa Rantau Keminting)
2. Sosialisasi pelaksanaan BUMDes kepada masyarakat juga masih tergolong minim. Pengurus BUMDes jarang melakukan kegiatan sosialisasi, yang mengakibatkan hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang BUMDes. Akibatnya, banyak warga yang tidak memahami, bahkan tidak menyadari bahwa desa mereka menerima bantuan dana dari pemerintah untuk mendukung program BUMDes. (Sumber Data: Masyarakat Desa Rantau Keminting)
3. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes juga masih sangat rendah. Banyak warga yang belum memahami cara mengelola BUMDes dengan baik dan

benar, padahal keterlibatan masyarakat sangat penting untuk kesuksesan BUMDes tersebut. Meskipun ada beberapa individu yang berpartisipasi, jumlahnya masih kurang, terutama dalam hal pengalaman dan keahlian. Ketiadaan pelatihan atau program peningkatan kapasitas membuat pengelolaan tetap tertinggal, seperti dalam hal promosi unit usaha yang ada, yang hingga kini belum banyak dikenal oleh masyarakat luar, sehingga perkembangan BUMDes pun terhambat. (Sumber Data: Aparatur Desa Rantau Keminting)

Pengelolaan berasal dari kata "kelola" yang ditambah dengan awalan "peng" dan akhiran "an," sehingga membentuk istilah "pengelolaan." Istilah ini mencakup berbagai aspek seperti pengurus, pengawasan, dan pengaturan. Dalam konteks lain, pengelolaan juga dikenal sebagai "manajemen."

Kata "manajemen" berasal dari bahasa Inggris "management," yang berakar dari kata kerja "to manage." Secara umum, "manage" berarti mengurus, mengemudikan, atau menjalankan, serta menggambarkan tindakan seseorang yang terlibat dalam kegiatan manajemen. Dalam pengertian yang lebih luas, manajemen merujuk pada keterlaksanaan dan pengaturan suatu kegiatan.

Meskipun istilah "management" berasal dari bahasa Inggris, ia telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "manajemen," dan memiliki makna yang sepadan dengan "pengelolaan." Manajemen menjadi proses yang fokus pada koordinasi dan integrasi berbagai kegiatan agar dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Proses pengelolaan ini dilakukan berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen itu sendiri.

Kata "manajemen" berakar dari kata "manage," yang berasal dari bahasa Latin "manus," yang berarti memimpin atau mengatur. Secara universal, manajemen didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja yang tinggi, baik dalam organisasi profit maupun nonprofit. Selain itu, manajemen juga diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan dalam mencapai hasil melalui kegiatan orang lain.

Mary Parker Follett mendeskripsikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, menekankan bahwa praktik dan implementasi manajemen harus menciptakan sistem yang baik dan efisien. Sementara itu, Luther Gulick menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari secara sistematis, dengan fokus pada unsur ilmiah dari manajemen sebagai sebuah disiplin.

Penting untuk diingat bahwa manajemen atau pengelolaan merupakan bentuk kerja yang esensial. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer harus melakukan berbagai kegiatan yang dikenal sebagai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi ini terdiri dari:

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian melibatkan pengelompokan dan penentuan berbagai kegiatan penting, serta memberikan wewenang kepada individu atau tim untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

3. Perekrutan (Staffing)

Perekrutan berfokus pada identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, termasuk proses pengerahan, penyaringan, pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja yang tepat.

4. Pemberian Motivasi (Motivating)

Pemberian motivasi bertujuan untuk mengarahkan dan menyalurkan perilaku individu agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan

5. Pengendalian (Controlling)

Pengendalian adalah proses mengukur pelaksanaan kegiatan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi penyebab penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan tujuan dapat tercapai.

Dengan memahami dan menerapkan fungsi-fungsi ini, manajer dapat mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai keberhasilan organisasi.

Pengertian mengenai desa ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat perbedaan dalam definisi desa antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dapat didirikan berdasarkan prakarsa masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan terminologi, secara esensi, definisi ini tidak berbeda jauh. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah tetap memberikan keleluasaan kepada desa dalam mengelola urusan dalam wilayahnya.

Sebagai daerah otonom, desa berhak atas sumber pendapatan yang beragam. Pendapatan desa mencakup pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Semua sumber pendapatan ini menjadi kekayaan bagi desa.

Pengelolaan kekayaan desa harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai prinsip, seperti kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pendekatan ini bertujuan agar pengelolaan kekayaan desa dapat berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang sering disingkat BUMDes, merupakan pilar utama dalam kegiatan ekonomi di desa, berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga sosial, BUMDes berfokus pada kepentingan masyarakat dengan memberikan berbagai pelayanan sosial. Sementara itu, dalam perannya sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk meraih keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ditawarkan kepada pasar. Oleh karena itu, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas sangat penting dalam menjalankan usaha ini.

Sebagai entitas hukum, BUMDes dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan di masyarakat desa. Hal ini memungkinkan bentuk BUMDes bervariasi di setiap desa di seluruh Indonesia, mencerminkan karakteristik lokal, potensi, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan utama BUMDes adalah meningkatkan pendapatan asli desa. Setiap pemerintah desa memiliki hak untuk mendirikan BUMDes yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, dengan mempertimbangkan potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumber daya lokal serta permintaan pasar.

BUMDes berpotensi menjalankan berbagai usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum,

tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi yang dapat dilaksanakan oleh BUMDes mencakup penyediaan layanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Selain itu, BUMDes juga dapat mengumpulkan dana dari masyarakat desa melalui pengelolaan tabungan, dana bergulir, serta kegiatan simpan pinjam.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang berarti bahwa variabel yang dianalisis memiliki sifat yang unik. Penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pokok pembahasan secara rinci. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memperjelas berbagai aspek dan tujuan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana penulis mencari informasi yang relevan dengan penelitian dari dokumen dan arsip yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah langkah penting dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa depan, serta merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Proses ini menjadi krusial sebelum melakukan tindakan, karena memungkinkan kita untuk merancang dan memperkirakan aktivitas yang akan datang.

a. Rencana Kegiatan

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, perencanaan sangat diperlukan pada tahap awal untuk merumuskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, kita dapat lebih mudah menuju pencapaian tujuan yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan kegiatan BUMDes di Desa Rantau Keminting telah dilaksanakan dengan baik. Proses perencanaan ini dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya dan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Diawali dengan pembentukan struktur organisasi, dilanjutkan dengan pembagian tugas untuk pengelolaan, serta melibatkan konsultan yang memberikan bimbingan dalam pengelolaan dan pemasaran BUMDes agar dapat berkembang lebih optimal.

Selain itu, dilakukan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas rencana BUMDes, termasuk penentuan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa. Proses ini juga mencakup perancangan yang matang, dengan adanya dokumen perencanaan tahunan yang memuat berbagai usaha yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan ini, selain menganalisis target penjualan, juga ditetapkan strategi dan dilakukan analisis terhadap pesaing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh George R. Terry dalam bukunya "Dasar-dasar Manajemen" (2020: 8), yang menyatakan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masa mendatang serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Strategi Untuk Mencapai Tujuan

Strategi memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), strategi yang tepat diperlukan sebagai langkah-langkah yang harus diambil untuk meraih tujuan tersebut.

Di Desa Rantau Keminting, strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan BUMDes sudah berjalan dengan baik. Melalui musyawarah dan kolaborasi, masyarakat saling bekerja sama untuk memajukan BUMDes. Mereka fokus pada pengembangan dan optimalisasi usaha sesuai dengan potensi desa yang ada. Promosi untuk setiap unit usaha juga menjadi perhatian utama agar usaha-usaha tersebut dapat berkembang lebih jauh. Berbagai cara dilakukan, antara lain melalui media sosial dan studi banding, sebagai upaya untuk mengenalkan usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa Rantau Keminting kepada masyarakat luas.

Dalam tahapan perencanaan, telah dilakukan analisis yang mendalam untuk merumuskan strategi masa depan dalam menjalankan BUMDes. Analisis tersebut mencakup target penjualan, proyeksi keuntungan, serta penilaian terhadap pesaing di luar sana. Hal ini bertujuan untuk mengenali kelemahan dan keunggulan BUMDes Ranting Mandiri jika dibandingkan dengan usaha sejenis yang ada di luar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori George R. Terry dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen" (2020: 8), yang menyatakan bahwa perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Organizing

Mengorganisasi berarti mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting, serta memberikan wewenang untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut.

a. Pembagian Tugas

Pembagian tugas memiliki tujuan utama untuk mempermudah proses pengelolaan. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, anggota kelompok tidak akan merasa bingung, karena setiap orang telah mendapatkan peran masing-masing. Hal ini memungkinkan pengelolaan dapat berjalan dengan lebih baik dan terstruktur.

Di Desa Rantau Keminting, proses pembagian tugas dalam pengelolaan BUMDes telah dilakukan dengan baik melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, dan masyarakat. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan bidang keahlian masing-masing anggota, dan struktur pengelolaan telah disusun demi kejelasan dan menghindari kebingungan.

Di dalam struktur ini, ketua bertugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi, dan mengawasi semua kegiatan usaha BUMDes. Sekretaris bertanggung jawab atas pengadministrasian kegiatan operasional, sementara bendahara mengelola aspek keuangan. Pengelola usaha, seperti penyewaan gedung serbaguna serta tenda dan kursi, memiliki tanggung jawab untuk memonitor kondisi dan kebersihan fasilitas. Di sisi lain, pengelola kolam ikan ditugaskan untuk secara rutin mengganti air dan memberi makan ikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Penelitian ini sejalan dengan teori George R. Terry dalam bukunya "Dasar-dasar Manajemen" (2020: 8), yang menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah proses pengelompokan, penentuan berbagai kegiatan penting, serta pemberian wewenang untuk

melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah proses di mana tugas-tugas dialihkan kepada individu lain yang sah atau terlegitimasi, berdasarkan mekanisme tertentu dalam organisasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat kemajuan. Dalam konteks ini, pengelola diberikan otoritas untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa mereka.

Di Desa Rantau Keminting, pelimpahan wewenang dalam pengelolaan BUMDes telah dilakukan dengan baik. Pengelola telah mendapatkan wewenang yang diperlukan dan telah menggunakannya secara efektif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Apabila salah satu pengelola tidak dapat menjalankan tugasnya, telah tersedia pengganti yang mampu melaksanakan fungsi tersebut dengan baik. Secara keseluruhan, tidak ada masalah yang signifikan terkait pelimpahan wewenang, dan semua arahan telah dilaksanakan dengan efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori George R. Terry yang dijelaskan dalam bukunya "Dasar-dasar Manajemen" (2020: 8), di mana istilah "organizing" merujuk pada pengelompokan, penentuan berbagai kegiatan penting, dan pemberian kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Staffing

Staffing merujuk pada penentuan kebutuhan sumber daya manusia, termasuk pengerahan, penyaringan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja.

a. Penempatan Sumber Daya Manusia Sesuai Fungsi

Penempatan sumber daya manusia yang tepat sangat penting dalam pengelolaan kegiatan untuk memastikan rencana dan tujuan dapat tercapai tanpa kegagalan. Dalam pengelolaan BUMDes di Desa Rantau Keminting, meskipun sumber daya manusia telah ditempatkan sesuai dengan fungsi masing-masing, hasilnya masih kurang optimal. Meskipun setiap individu memiliki potensi untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, mereka masih memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman dalam mengelola BUMDes.

Untuk memperkuat manajemen BUMDes, sangat penting untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang lebih berpengalaman dan terampil. Setiap fungsi memiliki peran yang jelas, seperti ketua yang memimpin program, sekretaris yang menangani administrasi, dan bendahara yang mengelola keuangan, serta pengelola usaha yang bertugas memantau kebersihan fasilitas dan merawat aset. Misalnya, pengelola kolam ikan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penggantian air secara rutin dan memberi makan ikan sesuai prinsip yang ditetapkan.

Namun, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori George R. Terry yang menyatakan bahwa staffing harus mencakup penentuan kebutuhan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam aspek staffing di BUMDes Desa Rantau Keminting.

4. Motivasi

Motivasi merupakan proses pengarahan perilaku manusia menuju pencapaian tujuan.

a. Pemberian Arahan

Pemberian arahan adalah langkah yang diambil untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada semua pihak yang terlibat, agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Di Desa Rantau Keminting, proses pengelolaan BUMDes terbilang kurang optimal. Meskipun sudah ada arahan terkait pengelolaan, hal ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal komunikasi. Arahan yang selama ini diberikan terfokus hanya pada pengelola BUMDes dan belum menyentuh masyarakat luas. Banyak warga yang belum paham tentang BUMDes dan jenis-jenis yang ada di desa mereka. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pengenalan pada masyarakat mengenai BUMDes. Temuan ini juga tidak sejalan dengan teori George R. Terry dalam bukunya "Dasar-dasar Manajemen" (2020: 8), yang menyatakan bahwa motivasi adalah proses pengarahan perilaku manusia menuju pencapaian tujuan.

b. Menggerakkan Anggota

Menggerakkan anggota adalah usaha untuk mendorong mereka agar melaksanakan tugas dengan semangat dan motivasi yang tinggi, demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pengelolaan BUMDes di Desa Rantau Keminting, kondisi ini masih kurang baik. Selama ini, hanya pengelola dan pemerintah desa yang aktif, sementara masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi. Banyak pengurus yang juga membutuhkan bimbingan dari pihak terkait, seperti tenaga ahli dari kabupaten atau pendamping desa dalam pengembangan BUMDes. Selain itu, ada beberapa program yang sudah terlaksana, seperti penyewaan gedung serbaguna, tenda, dan kursi, serta kolam ikan. Namun, inisiatif awal seperti usaha tusuk sate, abon cabe, dan VCO belum terlaksana. Diperlukan upaya yang lebih untuk meningkatkan pergerakan agar BUMDes dapat berkembang dengan lebih baik di masa depan. Temuan dari penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori George R. Terry mengenai motivasi.

5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses untuk mengukur pelaksanaan suatu kegiatan terhadap tujuan yang telah ditentukan, mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang terjadi, serta mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.

a. Menilai Pelaksanaan

Penilaian diperlukan untuk mengevaluasi apakah perencanaan telah berhasil dan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, program yang telah direncanakan harus diimplementasikan dengan sebaik mungkin agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pada tahap ini, anggota melaksanakan tugas mereka sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Desa Rantau Keminting menunjukkan bahwa kinerjanya masih kurang memuaskan. Meskipun sejumlah program telah dijalankan, seperti gedung serbaguna, tenda dan kursi, serta kolam ikan, masih banyak rencana yang belum terlaksana. Selain itu, pengelolaan BUMDes menghadapi beberapa kendala, antara lain pemasaran yang terbatas dan pertumbuhan keuntungan yang belum signifikan. Beberapa usaha yang direncanakan, seperti penjualan tusuk sate, abon cabe, dan VCO, belum dapat diimplementasikan.

Dari sisi pengawasan, langkah-langkah yang diambil terbilang minim dan kurang efektif. Pengawasan yang ada saat ini tidak dilakukan secara teratur; padahal seharusnya, kegiatan yang sering dilakukan perlu diimbangi dengan pengawasan yang lebih intensif.

Situasi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang jarang dilakukan tidak memenuhi harapan, sehingga perlu ada perbaikan di masa depan untuk mengoptimalkan pelaksanaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang diajukan oleh George R. Terry dalam bukunya "Dasar-dasar Manajemen" (2020: 8), yang menyatakan bahwa pengendalian meliputi pengukuran pelaksanaan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, identifikasi penyebab penyimpangan, serta pengambilan tindakan korektif yang diperlukan.

b. Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan bertujuan untuk memperbaiki hal-hal yang keliru atau tidak sesuai dalam pelaksanaan suatu kegiatan, agar masalah serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Dalam konteks pengelolaan BUMDes di Desa Rantau Keminting, upaya perbaikan yang telah dilakukan sejauh ini masih kurang memadai. Meskipun proses musyawarah telah diadakan untuk membahas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan, identifikasi kesalahan belum memadai. Saat ini, tindakan perbaikan yang diambil lebih berupa teguran dan belum sampai pada pemberian sanksi yang tegas. Tanpa adanya sanksi yang efektif, kemungkinan terulangnya kesalahan serupa akan tetap ada.

Sekali lagi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pandangan George R. Terry yang menyebutkan bahwa pengendalian melibatkan pengukuran pelaksanaan menurut tujuan yang ditetapkan, pemeriksaan penyebab penyimpangan, dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

1. Faktor Penghambat
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Pemasaran
2. Faktor Pendukung
 - a. Dukungan dari Pemerintah Desa

SIMPULAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih kurang baik. Pertama, dari sub variabel planning dengan indikator a. rencana kegiatan sudah baik dengan direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan dan adanya pembagian tugas untuk mengelola. Pada indikator kedua mengenai b. strategi untuk mencapai tujuan sudah baik karena saat perencanaan sudah dianalisis bagaimana strategi kedepannya untuk menjalankan BUMDes mulai dari analisis target penjualan, analisis keuntungan dan menganalisis pesaing usaha di luar sana. Kedua, dari sub variabel organizing dengan indikator a. pembagian tugas sudah baik dilakukan dengan penempatan sesuai bidang yang di kuasai dan sudah disusun strukturnya agar pembagian tugas semakin jelas dan tidak menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan. Pada indikator kedua mengenai b. pelimpahan wewenang sudah baik karena sudah melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, lalu jika yang bertugas tidak bisa menjalankan tugasnya atau sedang

berhalangan maka ada yang menggantikan dan dalam hal itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ketiga, dari sub variabel staffing dengan indikator a. menempatkan sumber daya sesuai dengan fungsinya masing-masing kurang baik karena tidak ada pelatihan dan masih minimnya pengalaman dalam mengelola BUMDes. Keempat, dari sub variabel motivating dengan indikator a. pemberian arahan kurang baik karena tidak memberikan arahan secara langsung tetapi hanya kepada bawahan atau pengelola BUMDes saja terkait pengelolaan. Pada indikator kedua mengenai b. menggerakkan anggota kurang baik karena hanya dari pengelola dan pemerintah desa yang aktif bergerak, untuk masyarakat masih kurang aktif berperan ataupun ikut berpartisipasi dan dalam penggerakannya para pengurus juga masih perlu bimbingan dari pihak terkait misalnya tenaga ahli kabupaten dan pendamping desa untuk pengembangan BUMDes. Kelima, dari sub variabel controlling dengan indikator a. menilai pelaksanaan kurang baik karena untuk program memang sudah terlaksana namun hanya sebagian saja, masih ada rencana yang belum tercapai, kemudian didalam pelaksanaannya juga menghadapi berbagai kendala mulai dari pemasaran yang belum bisa terlalu luas lalu keuntungan penghasilan dari BUMDes itu juga masih belum terlalu pesat. Pada indikator kedua mengenai b. tindakan perbaikan kurang baik karena tindakan perbaikannya saat ini masih berupa teguran belum ke arah tindakan dan pemberian sanksi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Rantau Keminting Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini terbagi menjadi dua yaitu, faktor penghambatnya adalah Pertama, sumber daya manusia masih kurang berkualitas, karena belum adanya pendidikan dan pelatihan untuk para pengelola BUMDes. Kedua, pemasarannya masih kurang karena dari segi perizinan yang masih belum sepenuhnya rampung sehingga sulit memasarkan secara luas. Sedangkan faktor pendorongnya adalah Pertama, meningkatkan ekonomi desa dengan mengembangkan potensi dan sumber daya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasrudin, Endin. (2020) *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahmadi, (2011) *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahman, Gazali. (2015) *Azas-Azas Manajemen*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Terry, George R dan Leslie W. Rue. (2020) *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.